



**PEMERINTAH  
KOTA PALU**



# **LAKIP 2021**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA PALU**



H. HADIANTO RASYID

RENY LAMADJIDO



*Bismilahirrahmanirahim*

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kinerja Pemerintah Kota Palu yang dilaporkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Palu kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 merupakan laporan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016–2021 yang berisi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palu beserta upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target serta menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Laporan ini juga memuat efisiensi yang dihasilkan dari implementasi SAKIP,



inovasi pencapaian kinerja serta penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Palu pada tahun 2021.

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Palu juga disampaikan melalui website: *palukota.go.id* pada menu e-SAKIP sebagai upaya transparansi kinerja kepada masyarakat serta dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e-SAKIP Reviu.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palu ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi atas kinerja Pemerintah Kota Palu.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya laporan ini. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Palu, Maret 2022

WALI KOTA PALU

  
H. HADIANTO RASYID, S.E

# IKHTISAR

## EKSEKUTIF

**T**ahun 2021 merupakan masa yang cukup berat bagi seluruh masyarakat Kota Palu. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kehidupan masyarakat, meski demikian perekonomian Kota Palu dapat bangkit. Hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,97 persen. Hal ini berbeda dengan Tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi berkontraksi ke angka minus 4,54 persen. Begitupun dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai instrumen pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat. IPM Tahun 2021 tumbuh menjadi 81,7 *point* dari tahun sebelumnya hanya sebesar 81,47 *point*.

Pemerintah Kota Palu dalam menjalankan roda pemerintahan terus bertekad untuk meningkatkan kinerja dengan semangat PALU MANTAP BERGERAK. Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2021 menetapkan 9 sasaran dengan 18 indikator. Hasil pengukuran menunjukkan capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Palu sebesar 87,82 %, yang dimaknai dalam kategori realisasi kinerja tinggi.

Pencapaian kinerja tersebut, merupakan kerja keras semua elemen aparat pemerintah bersama masyarakat dan seluruh stakeholder. Hal ini dilatarbelakangi semangat dalam melaksanakan pembangunan yang berkualitas demi mewujudkan Kota Palu yang mandiri, aman, dan nyaman, tangguh serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan

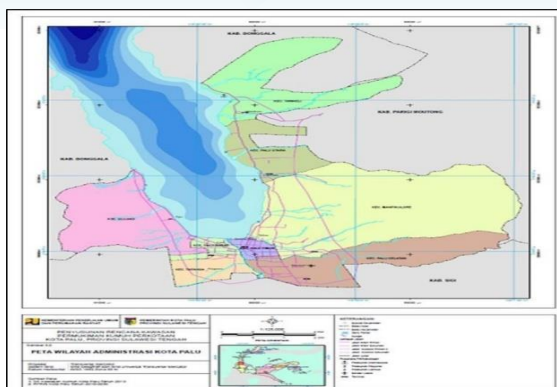
## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 GAMBARAN UMUM KOTA PALU

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 395,06 km<sup>2</sup> berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Secara astronomis Kota Palu terletak pada 0°,36" - 0,56"° Lintang Selatan dan 119°,45" - 121 °, 1" Bujur Timur. Secara administratif, Kota Palu berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, sebelah selatan dengan Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Sementara sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala.

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan, 289 Rukun Warga, dan 1.030 Rukun Tetangga. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km<sup>2</sup> (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km<sup>2</sup> atau hanya 1,95% dari luas wilayah Kota Palu. Sebagian besar kelurahan berada pada dataran Lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, sementara 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang pantai Teluk Palu.

Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1

Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Tahun 2022

Jumlah penduduk Kota Palu per 31 Desember 2021 sebesar 377.030 Jiwa (BPS,2022), dengan kepadatan penduduk sebesar 954 per km<sup>2</sup>. Adapun penduduk laki-laki berjumlah 189.042 jiwa (50,13%) dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 187.988 jiwa (49,86 %) sehingga rasio jenis kelamin (*Population Sex Ratio*) sebesar 100,56%. Kota Palu memiliki struktur usia penduduk yang berbentuk piramida ekspansif, dengan sebaran didominasi usia produktif. Sebaran struktur umur penduduk Kota Palu Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini :



Sumber : Kota Palu Dalam Angka, 2022.

Gambar 1.2

Struktur Umur dan Jumlah Penduduk Kota Palu

Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak

produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Palu pada tahun 2021 adalah 30,66 %. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja atau dianggap produktif mempunyai tanggungan sebanyak 31 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Palu telah menikmati bonus demografi.

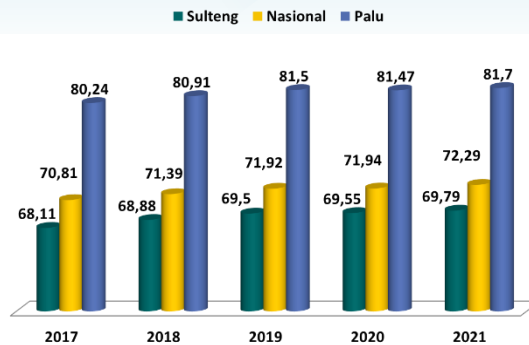
## 1.2 PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU

Kualitas pembangunan sebuah wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM terdiri dari variabel pendidikan, variabel kesehatan, dan variabel kondisi ekonomi masyarakat. Variabel kesehatan meliputi indikator usia harapan hidup, variabel pendidikan meliputi indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sementara kondisi masyarakat berdasarkan indikator daya beli masyarakat dengan melihat pengeluaran per kapita penduduk.

IPM Kota Palu termasuk kategori tinggi dengan capaian 81,7 di Tahun 2021. Capaian ini mendudukkan Kota Palu sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Tengah. Tingginya IPM Kota Palu ditopang oleh peningkatan usia harapan hidup dari Tahun 2020 sebesar 71,04 tahun menjadi 71,09 tahun di Tahun 2021. Untuk komposit pendidikan, dari rata-rata lama sekolah selama 11,61 tahun di Tahun 2020 menjadi 11,72 tahun di Tahun 2021. Untuk harapan lama sekolah dari 16,23 tahun di Tahun 2020 menjadi 16,28 Tahun di 2021. Selanjutnya, indikator ekonomi terjadi perbaikan standar hidup yang layak dari sebelumnya. Hal ini dilihat dari pengeluaran perkapita sebesar 14,83 juta Tahun 2020 menjadi 14,89 juta di Tahun 2021. Trend perkembangan IPM Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 1,3 di bawah ini :



### Indeks Pembangunan Manusia (poin)



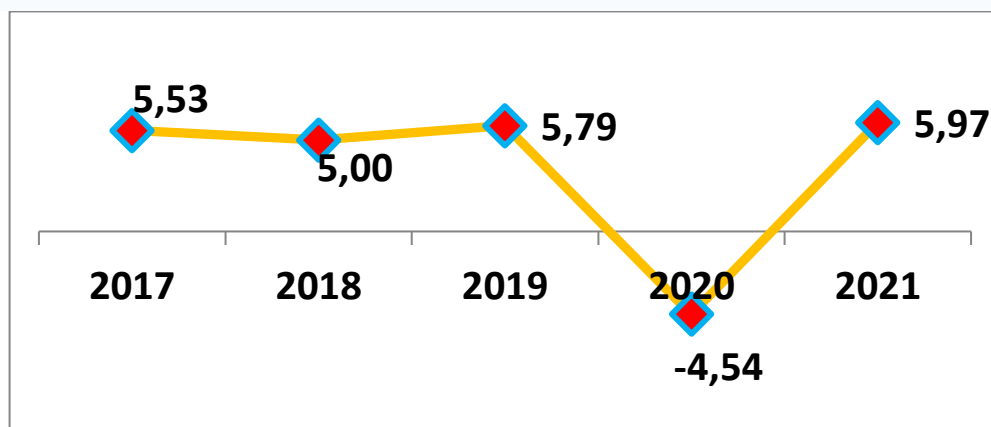
Sumber : Kota Palu Dalam Angka, 2022.

Gambar 1.3  
IPM Kota Palu Tahun 2017-2021

### 1.3 PEREKONOMIAN KOTA PALU

Kebijakan pembangunan Kota Palu sesuai dengan tema pembangunan Kota Palu Tahun 2021 yakni mewujudkan Kota Palu sebagai kota jasa, berbudaya, dan beradab dilandaskan iman dan taqwa yang tangguh bencana. Pemilihan tema ini mampu mendorong bangkitnya kembali perekonomian Kota Palu pasca bencana alam dan dampak bencana non alam (Covid-19).

Perekonomian Kota Palu Tahun 2021 tumbuh sebesar 5,97 %. Hasil ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Kota Palu Tahun 2021 sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar 16,4 triliun. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku, maka PDRB Kota Palu Tahun 2022 sebesar 26,1 triliun. Selanjutnya, PDRB perkapita sebesar 69,32 juta. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palu Tahun 2017 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1 .4 di bawah ini :



Sumber : Kota Palu Dalam Angka, 2022.

Gambar 1.4  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2017-2021

Melihat kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021, maka lapangan usaha konstruksi berkontribusi paling besar yakni sebesar 19,30 %, disusul lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 14,53 %, selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 10,45 %.

#### 1.4 SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA PALU

Pemerintah Kota Palu dipimpin oleh Walikota, H. Hadianto Rasyid, S.E dan Wakil Walikota, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes sesuai hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020. Adapun periode menjabat yakni dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Pelaksanaan tugasnya Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta organisasi perangkat daerah.

Merujuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;

3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas sebanyak 23 Dinas;
5. Badan Daerah sebanyak 6 Badan; dan
6. Kecamatan sebanyak 8 Kecamatan.

Pelaksanaan urusan pemerintah untuk menjalankan roda Pemerintah Kota Palu didukung oleh sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 sebanyak 5.686 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 1.868 laki-laki atau 32,85 % dan 3.818 perempuan atau 67,15%. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, rata-rata pendidikan PNS di Kota Palu adalah setingkat sarjana yakni sebesar 69,08 persen. Sementara, tingkat Diploma, SMA dan di bawah SMA masing-masing sebesar 13,91 persen, 16,46 persen dan 0,55 persen.

### **1.5 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA PALU**

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang (Permendagri 86 Tahun 2017). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor Tahun 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka dapat diuraikan isu strategis Pemerintah Kota Palu, sebagai Berikut:

- 1) Peningkatan kualitas sistem Informasi daerah;
- 2) Pembangunan pendidikan berkualitas dan terjangkau;
- 3) Pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
- 4) Kemiskinan kota;

- 5) Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat perkotaan;
- 6) Rasionalisasi birokrasi pemerintah daerah;
- 7) Pengembangan sistem transportasi umum;
- 8) Peningkatan kualitas Infrastruktur kota berbasis budaya;
- 9) Peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman kota;
- 10) Pembangunan berbudaya dan beradat; dan
- 11) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.





# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 VISI DAN MISI



#### Visi Kota Palu Tahun 2016 – 2021

#### “PALU KOTA JASA BERBUDAYA DAN BERADAT DILANDASI IMAN DAN TAKWA”

Penjabaran visi Pemerintah Kota Palu Tahun 2016-2021 melalui enam misi. Misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2016-2022, yakni :

1. Terwujudnya pemetaan potensi sumber daya Kota Palu berbasis IT ;
2. Peningkatan dan pengembangan daya saing potensi sumber daya manusia;
3. Kelurahan inovasi unggul dan mandiri berbasis lptek bagi kemandirian ekonomi kerakyatan;
4. Rasionalisasi birokrasi pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya;
5. Penataan dan pengembangan infrastruktur kota berbasis wisata budaya;
6. Revitalisasi nilai-nilai budaya bangsa.

Misi yang diemban untuk mencapai visi dikelompokkan ke dalam enam pilar pembangunan yaitu Pilar (1)Sistem Informasi (2)Sumberdaya manusia, (3)Ekonomi Mandiri, (4)*Good governance*, (5) Infrastruktur, serta (6)Adat dan budaya.

Selanjutnya, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran daerah pembangunan Kota Palu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah 2016 - 2021**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradab Dilandasi Iman dan Takwa	1. Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT	Mewujudkan informasi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi sumber daya kota palu berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi
	2. Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumber daya Manusia	Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah
			Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan lama sekolah
				Angka harapan hidup

	3. Kelurahan inovasi unggul dan mandiri berbasis Iptek bagi kemandirian ekonomi kerakyatan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata dalam upaya kemandirian ekonomi masyarakat	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perdagangan terhadap PDRB
			Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB
	4. Rasionalisasi birokrasi pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Opini Laporan Keuangan				
Nilai SAKIP				
5. Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dasar dan infrastruktur yang bernilai budaya	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	Rasio Sampah Tertangani
				Cakupan Layanan Transportasi Kota



				<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>
				<b>Rasio Jalan Kondisi Mantap</b>
		<b>Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana</b>	<b>Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana</b>	<b>Indeks resiko bencana</b>
<b>6. Revitalisasi nilai-nilai budaya bangsa</b>	<b>Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya</b>	<b>Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya dalam berbagai aspek masyarakat</b>		<b>Indeks kerukunan umat beragama</b>
				<b>Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya</b>

Tahun 2020 Kota Palu melakukan pemilihan kepala daerah. Kontestasi tersebut, menetapkan H. Hadianto Rasyid, S.E sebagai Wali Kota Palu dan dr. Reny A. Lamadjido, M.Kes.,Sp.PK sebagai Wakil Wali Kota Palu terpilih untuk periode 2021-2026. Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan untuk menyusun dan menetapkan RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, ditetapkan visi dan misi Kota Palu.

### Visi Kota Palu Tahun 2021 – 2026

Visi

**“Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”**



## Misi 1

Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global



## Misi 2

Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana



## Misi 3

Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid-19



## Misi 4

Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani

**Mandiri – Aman – Nyaman – Tangguh – Profesional – Berkelanjutan  
– Kearifan Lokal – Keagamaan**

yang digaungkan dengan **PALU MANTAP BERGERAK**

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu Kota Cerdas (*smart city*), Kota tangguh (*Resilience city*), Kota hijau (*green city*), dan Kota inklusif (*inclusive city*).

Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator pembangunan Kota Palu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah 2021 - 2026**

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Membangun Kota Palu yang Mandiri Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan	1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
					Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB
					Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB
	2. Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana	Indeks Kota Layak Huni Indeks Risiko Bencana		Indeks Kota Layak Huni
					Indeks Risiko Bencana
				Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks ketentraman dan ketertiban



an Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan	Berketahan an terhadap Bencana			Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan	Persentase jalan yang berkeselamatan	
					Persentase Layanan Angkutan Darat	
					Persentase luas kawasan kumuh	
					Persentase rumah tidak layak huni	
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Meningkatnya ketangguhan kota		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW		
			Meningkatnya ketangguhan kota	Indeks Pembangunan Manusia		
	3. Mengembang kan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia		Harapan Lama Sekolah
					Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah
					Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
						Case Fatality Rate Covid-19

	<b>Bencana dan Covid-19</b>			<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial</b>	<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan</b>
					<b>Indeks Pembangunan Gender</b>
					<b>Indeks Kota Layak Anak</b>
				<b>Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan</b>	<b>Indeks kerukunan umat beragama</b>
	<b>4. Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani</b>	<b>Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>Indeks Aktualisasi Pancasila</b>
					<b>Indeks pembangunan kebudayaan</b>
				<b>Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan</b>	<b>Opini BPK</b>
					<b>Nilai Evaluasi AKIP</b>
				<b>Tingkat Maturitas SPIP</b>	

				<b>Meningkatnya mutu aparatur sipil negara</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>
				<b>Meningkatnya kinerja pelayanan publik</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>
				<b>Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Indeks Inovasi Daerah</b>
					<b>Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>
				<b>Meningkatnya penataan regulasi daerah</b>	<b>Indeks Kualitas Kebijakan</b>

## 2.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016 - 2021. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun IKU Pemerintah Kota Palu Tahun 2016 -2021 ditetapkan sebagai erikut :

**Tabel 2.3**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 2016-2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	FORMULA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya kota palu berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	Hasil survei dibagi pemetaan potensi dikali 100 %
2	<b>Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan</b>	Angka rata-rata lama sekolah	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ <p>dengan:</p> <p><math>P_{15+}</math> = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas  Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak pernah sekolah = 0</li> <li>Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> <li>Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1</li> <li>Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir</li> <li>Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> </ol>
		Angka harapan lama sekolah	<p><b>Formula</b> → <math display="block">HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}</math></p> <p>Keterangan:</p> <p><math>HLS_a^t</math> : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t  <math>E_i^t</math> : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t  <math>P_i^t</math> : Jumlah penduduk usia i pada tahun t  i : Usia (a, a + 1, ..., n)  FK : Faktor konversi pesantren</p>



3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	Jumlah umur orang yang meninggal / jumlah orang yang meninggal Harga = (nilai rata rata / 100) * PDRB tahun 2015
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	Kontribusi sector pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	Harrga = (nilai rata rata / 100)*PDRB tahun 2015
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industry pengolahan terhadap PDRB	Harga = (nilai rata rata / 100)*PDRB tahun 2015
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	Rata-rata nilai IKM OPD/unit pelayanan publik
		Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai indeks capaian kinerja (ICK) dan nilai kesesuaian materi (IKM) 100%
		Opini Laporan Keuangan	Hasil penilaian BPK
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Hasil penilaian KEMENPAN-RB
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	Jumlah Kawasan terintervensi berbasis Budaya dan adat / jumlah seluruh kawasan x 100%
		Rasio sampah tertangani	Jumlah sampah tertangani / jumlah produksi sampah di Kota Palu x 100%

		Cakupan layanan Transportasi Kota	Jumlah titik parkir x jumlah pelayanan angkutan masal x 100 jumlah lintas trayek x 100/3
		Indeks kualitas lingkungan hidup	IKLH
		Rasio jalan kondisi mantap	Jumlah jalan dalam kondisi mantap / jumlah di Kota Palu x 100%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana budaya	Indeks resiko bencana	IRB
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan beragama	Nilai indek kerukunan Beragama Berdasarkan variabel dan indicator toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat Beragama
		Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	umlah kebijakan, <b>policy Brief</b> (kebijakan khusus) dan inovasi yang dirumuskan dan dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan Budaya dan kearifan local daerah

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021 - 2026. IKU tersebut, merupakan ukuran keberhasilan

terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun IKU Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	FORMULA
1	2	3	4
1	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sector ekonomi potensial daerah	- Laju Pertumbuhan Ekonomi	$R = \frac{PDB_{t} - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100$
		- Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor Sekunder dibagi PDRB x 100
		- Kontribusi sector tersier terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor Tersier dibagi PDRB x 100
2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	- Indeks Kota Layak Huni	Publikasi Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP)
		- Indeks Resiko Bencana	Publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		- Indeks kualitas lingkungan hidup	IKLH = (30%xIndeks Kualitas Air + 30%xIndeks Kualitas Udara + 40%xIndeks Kualitas Tutupan Lahan)
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	- Indeks ketenteraman dan ketertiban	Publikasi Kepolisian RI
4	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur	- Persentase jalan yang berkeselamatan	Panjang jalan yang memenuhi standar keselamatan dibagi panjang jalan kota di kali 100

	yang berketahanan	- Persentase layanan Angkutan Darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$
		- Persentase luas Kawasan kumuh	$\text{Nilai Rentang [ NR ] } = \frac{[\sum \text{Nilai Tertinggi} - \sum \text{Nilai Terendah}]}{3}$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kategori kumuh berat pada nilai = 55-75</li> <li>2. Kategori kumuh sedang pada nilai = 35-54</li> <li>3. Kategori kumuh ringan pada nilai = 15-34</li> </ol>
		4. Persentase rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah layak huni dikali 100
		5. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Perbandingan antara Pemanfaatan(penggunaan ) lahan eksisting dengan rencana tata ruang wilayah dikali 100
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	6. Indeks ketangguhan kota	Formulasi Dissaster Resilience Assesment ( United Nations Office for Disaster Risk Reduction)
7	Meningkatnya kualitas Pendidikan	7. Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{\text{kesehatan} \times \text{pendidikan} \times \text{pengeluaran}} \times 100$
		8. Harapan lama sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana :</p> <p><math>HLS_a^t</math> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p><math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ... n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p>
		9. Rata rata lama sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p><math>x_i</math> = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>
8	Meningkatnya derajat	10. <b>Angka Harapan Hidup</b>	Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur

	kesehatan masyarakat		seseorang yang diharapkan dapat terus hidup (Publikasi BPS).
		11. Case Fatality Rate Covid-19	$CFR = \frac{\text{Jumlah kematian Akibat penyakit dalam periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah penyakit yang terdiagnosa dalam periode waktu yang sama}} \times 100\%$
9	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	12. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terberdayakan dibagi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di kali 100
		13. Indeks pembangunan Gender	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki
		14. Indeks Kota Layak Anak	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak}}{\text{Jumlah Kabupaten / Kota di Provinsi}} \times 100\%$
10	Meningkatnya Pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan kearifan local dan kebangsaan	15. Indeks kerukunan umat beragama	Hasil penilaian Kementerian Agama Republik Indonesia
		16. Indeks aktualisasi Pancasila	$IAP = \sum_{i=1}^5 (W_i \times SX_i)$ <p>IAP : Indeks Aktualisasi Pancasila  W<sub>i</sub> : Bobot indikator ke-i  SX<sub>j</sub> : nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi</p>
		17. Indeks Pembangunan kebudayaan	$\text{Indeks } D_j = \left( \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) * 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SX<sub>ji</sub> adalah nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi</li> <li>- N<sub>j</sub> adalah banyaknya indikator dimensi ke-j</li> <li>- D<sub>j</sub> adalah indeks dimensi ke-j</li> </ul> $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j * \text{Indeks } D_j)$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan</li> <li>- D<sub>j</sub> adalah Dimensi ke-j</li> <li>- W<sub>j</sub> adalah Bobot Dimensi ke-j</li> </ul>



11	Meningkatnya akuntabilitas transparansi, dan kinerja pemerintahan	18. Indeks Reformasi Birokrasi	Publikasi Hasil Penilaian Kemenpan-RB
		19. Opini BPK	Hasil audit BPK
		20. Nilai Evaluasi AKIP	Penilaian Kemenpan dan RB
		21. Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian BPKP
		22. Indeks Kota Layak Anak	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak}}{\text{Jumlah Kabupaten / Kota di Provinsi}} \times 100\%$
12	Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara	23. Indeks Profesionalitas ASN	$\text{IdxPro} = \text{koef}(1-\text{gaps}) + \text{koef}(KJ) + \text{koef}(1-\delta \text{SI}) + \text{koef}(1-\text{InDiscpl})$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gaps adalah % ASN yang tidak kompeten</li> <li>• KJ adalah angka SKP</li> <li>• <math>\delta</math> SI adalah selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja PNS untuk jabatan yang sama (%)</li> <li>• Discpl adalah jumlah pelanggaran disiplin</li> </ul>
13	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	24. Indeks Pelayanan Publik	<p><b>1 Menentukan nilai untuk setiap indikator</b></p> $N_{a,gs} = \frac{(a,gs)}{3} \times b, b \text{ per nilai}$ <p><b>2 Menentukan nilai setiap aspek</b></p> $N_{gs} = \sum_{i=1}^n \text{per nilai}$ <p><b>3 Menentukan indeks</b></p> $N_{a,ndeks} = \sum_{i=1}^n (n_{a,gs} \times b, b \text{ t.a, poka})$

14 Meningkatkan pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi

25. Indeks Inovasi daerah

$$i = 2(2S_{x1} + 2S_{x2} + 2.5S_{x3} + 3.5S_{x4})$$

$S_{x1}$  = score dimensi input

$S_{x2}$  = score dimensi proses

$S_{x3}$  = score dimensi output

$S_{x4}$  = score dimensi outcome

Adapun formulasi perhitungan masing-masing dimensi adalah sebagai berikut.

#### 1. Dimensi Input

Terdiri dari 10 indikator, sehingga rumus perhitungan dimensi input adalah:

$$S_{x1} = \frac{1}{10}(S_{x1,1} + \dots + S_{x1,10})$$

dimana:

- $S_{x1,1}$  = Visi Inovasi
- $S_{x1,2}$  = Komitmen Perubahan
- $S_{x1,3}$  = Reward bagi Inovator
- $S_{x1,4}$  = Kebijakan Pendorong Inovasi
- $S_{x1,5}$  = Kapasitas SDM Inovasi
- $S_{x1,6}$  = Kepedulian SDM terhadap Inovasi
- $S_{x1,7}$  = Pengembangan SDM Inovasi
- $S_{x1,8}$  = Dukungan Anggaran
- $S_{x1,9}$  = Optimalisasi CSR dalam Mendukung Inovasi
- $S_{x1,10}$  = Penggunaan IT dalam Sistem Kerja

#### 2. Dimensi Proses

Terdiri dari 7 indikator, sehingga rumus perhitungan dimensi proses adalah:

$$S_{x2} = \frac{1}{7}(S_{x2,1} + \dots + S_{x2,7})$$

dimana:

- $S_{x2,1}$  = Sosialisasi Kebijakan Inovasi
- $S_{x2,2}$  = Bimtek/Advokasi/Pendampingan
- $S_{x2,3}$  = Program Pengembangan Inovasi di RPJMD
- $S_{x2,4}$  = Program & Kegiatan Inovasi di Renstra SKPD
- $S_{x2,5}$  = Pengembangan Jejaring Inovasi
- $S_{x2,6}$  = Benchmarking Menggali Ide & Gagasan Inovasi
- $S_{x2,7}$  = Pemanfaatan Hasil Benchmarking

#### 3. Dimensi Output

Terdiri dari 20 indikator, sehingga rumus perhitungan dimensi output adalah:

$$S_{x3} = \frac{1}{20}(S_{x3,1} + \dots + S_{x3,20})$$

dimana:

- $S_{x3,1}$  = Jumlah Inovasi yang Dihasilkan
- $S_{x3,2}$  = Jenis Inovasi yang Dihasilkan
- $S_{x3,3}$  = Kualitas Inovasi
- $S_{x3,4}$  = Kebijakan Pendorong Inovasi
- $S_{x3,5}$  = Pelembagaan Inovasi
- $S_{x3,6}$  = Ketersediaan Informasi Layanan
- $S_{x3,7}$  = Penyelesaian Layanan Pengaduan
- $S_{x3,8}$  = Tingkat Kepuasan Layanan Publik
- $S_{x3,9}$  = Peningkatan Jumlah Perizinan
- $S_{x3,10}$  = Peningkatan Pendapatan Perkapita
- $S_{x3,11}$  = Peningkatan Lapangan Kerja
- $S_{x3,12}$  = Peningkatan Investasi
- $S_{x3,13}$  = Penurunan Angka Kemiskinan
- $S_{x3,14}$  = Peningkatan PAD
- $S_{x3,15}$  = Transparan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- $S_{x3,16}$  = Tingkat Partisipasi Stakeholders
- $S_{x3,17}$  = Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
- $S_{x3,18}$  = Nilai Capaian LAKIP
- $S_{x3,19}$  = Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan
- $S_{x3,20}$  = Peningkatan Nilai IPM

#### 4. Dimensi Outcome

Terdiri dari 7 indikator, sehingga rumus perhitungan dimensi outcome adalah:

$$S_{x4} = \frac{1}{7}(S_{x4,1} + \dots + S_{x4,7})$$

dimana:

- $S_{x4,1}$  = Ketersediaan Informasi Layanan
- $S_{x4,2}$  = Kemudahan Poses Layanan
- $S_{x4,3}$  = Keandalan Sistem
- $S_{x4,4}$  = Kecepatan Layanan
- $S_{x4,5}$  = Kemanfaatan Inovasi
- $S_{x4,6}$  = Relevansi Inovasi dengan Program Prioritas Daerah
- $S_{x4,7}$  = Tingkat Kepuasan Layanan

26. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis

Hasil Penilaian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika

		Elektronik (SPBE)	
15	Meningkatnya penataan regulasi daerah	27. Indeks Kualitas Kebijakan	Formula sesuai surat edaran Kepala LAN RI Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan

Berdasarkan Tabel 2.2 dan 2.4 di atas, maka sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 sebagai berikut:

Misi 1 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja.

Misi 2 terdapat 5 (lima) sasaran, dan 10 (sepuluh) indikator kinerja.

Misi 3 terdapat 4 (empat) sasaran, dan 11 (sebelas) indikator kinerja

Misi 4 terdapat 5 (lima) sasaran, dan 9 (sembilan) indikator kinerja.

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu Tahun 2021, merupakan tolok ukur pengukuran capaian kinerja Tahun 2021, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pernyataan Perjanjian Kinerja dan lampiran Perjanjian Kinerja. Gambaran Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 dapat diuraikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
----	---------	-------------------	--------

1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya kota palu berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	95 %
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11.50
		Angka harapan lama sekolah	16.40
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70,69 Tahun
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	Kontribusi sector pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	23,35
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industry pengolahan terhadap PDRB	12,44
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	79,48 (Baik)
		Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3,02
		Opini Laporan	WTP
		Nilai system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	BB
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	95%

		Rasio sampah tertangani	100%
		Cakupan layanan Transportasi Kota	100%
		Indeks kualitas lingkungan hidup	73,92
		Rasio jalan kondisi mantap	90,14%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana budaya	Indeks resiko bencana	110,54
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan beragama	75
		Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	28

Mengacu pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 serta indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026, maka ditetapkan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2021. Perubahan perjanjian kinerja diuraikan sebagai berikut :



**Tabel 2.6**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sector ekonomi potensial daerah	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,54
		2. Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	26,41
		3. Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	63,47
2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	4. Indeks Kota Layak Huni	30
		5. Indeks Risiko Bencana	150,16
		6. Indeks kualitas lingkungan hidup	73,92
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	7. Indeks ketenteraman dan ketertiban	100
4	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan	8. Persentase jalan yang berkeselamatan	1,34
		9. Persentase layanan Angkutan Darat	17,99
		10. Persentase luas Kawasan kumuh	0,67
		11. Persentase rumah tidak layak huni	11,40
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	12. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	75
6	Meningkatnya ketangguhan kota	13. Indeks ketangguhan kota	263
7		14. Indeks Pembangunan Manusia	81,47

	Meningkatnya kualitas Pendidikan	15. Harapan lama sekolah	16,23
		16. Rata rata lama sekolah	11,61
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	17. Angka harapan hidup	71,04
		18. Case fatality Rate Covid-19	2,89
9	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	19. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan	50
		20. Indeks pembangunan Gender	97,96
		21. Indeks Kota Layak Anak	Pratama
10	Meningkatnya Pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan kearifan local dan kebangsaan	22. Indeks kerukunan beragama	82
		23. Indeks aktualisasi Pancasila	60
		24. Indek Pembangunan kebudayaan.	48,11
11	Meningkatnya akuntabilitas transparansi, dan kinerja pemerintahan	25. Indeks Reformasi Birokrasi	50,07
		26. Opini BPK	WTP
		27. Nilai Evaluasi AKIP	B
		28. Tingkat Maturitas SPIP	LEVEL II
12	Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara	29. Indeks Profesionalitas ASN	50
13	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	30. Indeks Pelayanan Publik	B

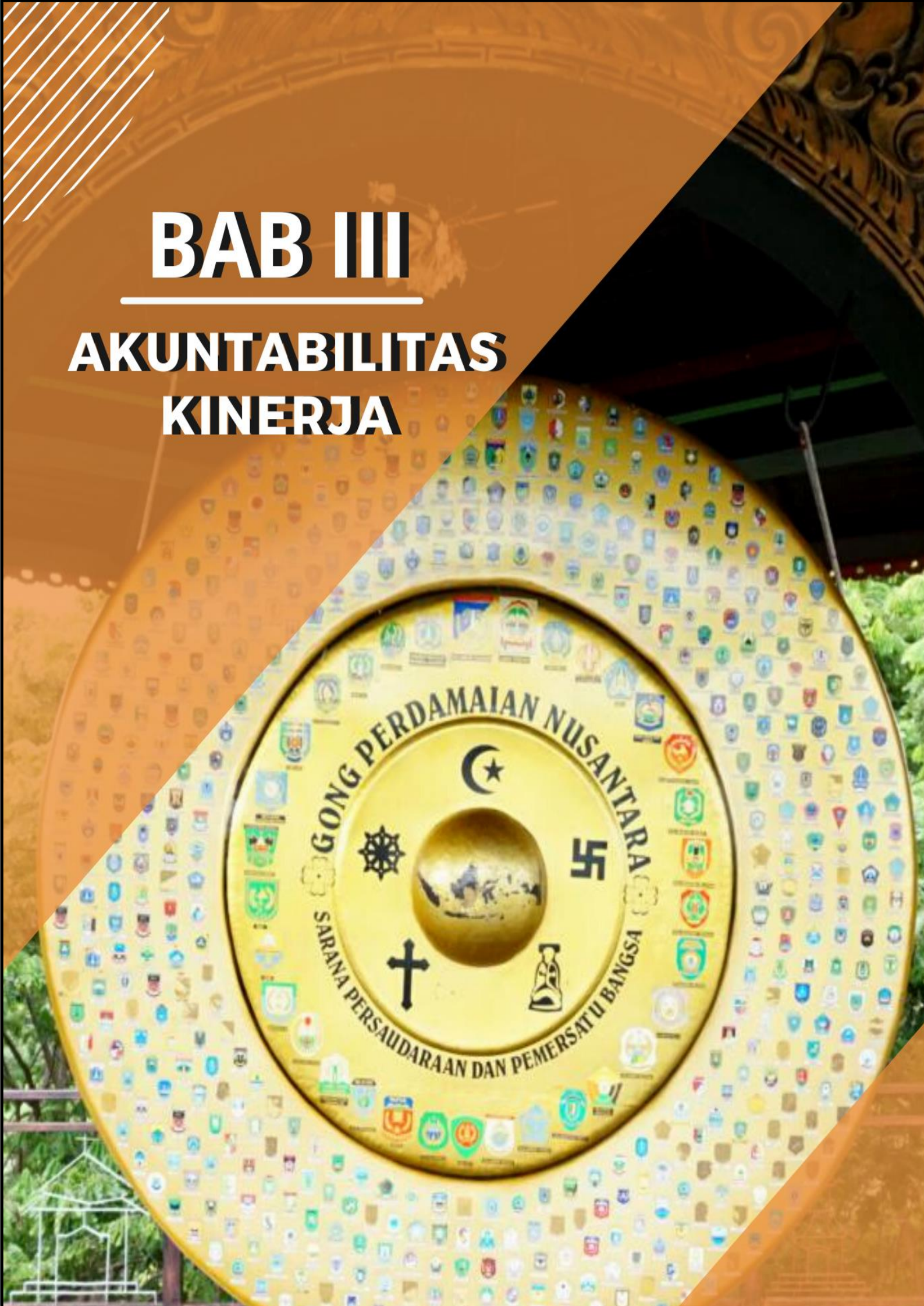
14	Meningkatnya pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi	31. Indeks Inovasi daerah	23
		32. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	1,54
15	Meningkatnya penataan regulasi daerah	33. Indeks Kualitas Kebijakan	60



# BAB III

---

## AKUNTABILITAS KINERJA



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Palu dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian sebagai umpan balik untuk perbaikan agar target kinerja dapat tercapai. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk permasalahan yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah (*problem solving*).

Untuk mempermudah pemaknaan atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Palu tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Capaian Indikator Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Interpretasi Realisasi Kinerja
1.	$90,01\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017



Capaian kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 yang diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta target akhir RPJMD Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

### 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu

#### 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021.

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2021 digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Berdasarkan RPJMD 2016 – 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	
			Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya kota palu berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	95 %	100%
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11.50	11,72
		Angka harapan lama sekolah	16.40	16,28
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70,69 Tahun	71,09 Tahun
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	Kontribusi sector pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	23,35	14,29



5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industry pengolahan terhadap PDRB	12,44	6,49
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	79,48 (Baik)	82,39 (Sangat Baik)
		Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3,02	2,86 (capaian 2020)
		Opini Laporan	WTP	WTP
		Nilai system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	BB	B
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	95%	95%
		Rasio sampah tertangani	100%	92,50%
		Cakupan layanan Transportasi Kota	100%	53%
		Indeks kualitas lingkungan hidup	73,92	67,2%
		Rasio jalan kondisi mantap	90,14%	63,69%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana budaya	Indeks resiko bencana	110,54	162,70
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam	Indeks kerukunan beragama	75	76,6

berbagai aspek kehidupan masyarakat	Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	28	35
-------------------------------------	--	----	----

*Sumber data: BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu*

## **2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	%Capaian Target 2020	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Target
1	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	100 %	95%	100%	105
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,61	99,27%	11,72	102
		Angka harapan lama sekolah	16,23	102,02%	16,28	99
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	71,04	100,68	71,09	101
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian	Kontribusi sector pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	13,9	100%	14,29	61
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Kontribusi kategori industry pengolahan terhadap PDRB	9,77%	100%	6,49%	101,91

	berbasis kelompok dan kluster					
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	78,48 (Baik)	100%	82,39 (Sangat Baik)	103,66
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,8613	Prestasi tinggi	2,8613	94,75
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	CC	B	75
7	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur	Cakupan Kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	94%	100%	95%	100
		Rasio Sampah Tertangani	90,91%	100%	92,50%	92,5
		Cakupan layanan Transportasi Kota	67%	87%	53 %	53
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,2%	>70%	67,2%	90,91
		Rasio Jalan Kondisi Mantap	59,92%	67,53%	63,69 %	70,66

8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak Bencana	Indeks resiko Bencana	104,83	100%	162,7	52,81
9	Meningkatnya penerapan nilai nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan beragama	82	72	76,6	102,13
		Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	74	27	35	125

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD Tahun 2021

Target Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 dengan rincian digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target Kinerja dalam RPJMD (2016 – 2021)**

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2021	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021	% Capaian target	Rumus
1	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	95 %	100%	105	Hasil survei dibagi pemetaan potensi dikali 100 %



2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,5	11,72	102	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ <p>dengan:</p> <p><math>P_{15+}</math> = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas  Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak pernah sekolah = 0</li> <li>Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> <li>Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1</li> <li>Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir</li> <li>Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> </ol>
---	--	------------------------------	------	-------	-----	--

		Angka harapan lama sekolah	16,4	16,28	99	<p><b>Formula</b> → <math display="block">HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}</math></p> <p>Keterangan:</p> <p><math>HLS_a^t</math> Harapan Lama Sekolah pada umur <math>a</math> di tahun <math>t</math>  <math>E_i^t</math> Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math>  <math>P_i^t</math> Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math>  <math>i</math> Usia (<math>a, a + 1, \dots, n</math>)  <math>FK</math> Faktor koreksi pesantren</p>
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70,96	71,09	101	Jumlah umur orang yang meninggal / jumlah orang yang meninggal Harga = (nilai rata rata / 100)*PDRB tahun 2015
4	Meningkatnya revitalisasi sector pertanian dan IKM	Kontribusi sector pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	23,35%	14,29%	61	Harrga = (nilai rata rata / 100)*PDRB tahun 2015
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	12,44%	6,49	52,17	Harga = (nilai rata rata / 100)*PDRB tahun 2015

6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	79,48 (Baik)	82,39 (Sangat Baik)	103,66	Rata-rata nilai IKM OPD/unit pelayanan publik
		Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3,02	2,8613	94,75	Nilai indeks capaian kinerja (ICK) dan nilai kesesuaian materi (IKM) 100%
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP ( <i>capaian 2020</i> )	100	Hasil penilaian BPK
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	BB	B ( <i>capaian 2020</i> )	75	Hasil penilaian KEMENPAN-RB
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan Kawasan terintervensi berbasis Budaya dan adat	95%	95%	100%	Jumlah Kawasan terintervensi berbasis Budaya dan adat / jumlah seluruh kawasan x 100%
		Rasio sampah tertangani	100%	92,50%	92,50%	Jumlah sampah tertangani / jumlah produksi sampah di Kota Palu x 100%
		Cakupan layanan Transportasi Kota	100%	53 %	53%	Jumlah titik parkir x jumlah pelayanan angkutan masal x 100 jumlah lintas trayek x 100/3

		Indeks kualitas lingkungan hidup	73,92%	67,2%	90,91%	IKLH
		Rasio jalan kondisi mantap	70,66 %	63,69 %	70,66%	Jumlah jalan dalam kondisi mantap / jumlah di Kota Palu x 100%
<b>8</b>	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak Bencana Budaya	Indeks resiko Bencana	110,54	162,70	52,81%	IRB
<b>9</b>	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan beragama	75	76,6	102,13%	Nilai indek kerukunan Beragama Berdasarkan variabel dan indicator toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat Beragama
		Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan Budaya	28	35	125	Jumlah kebijakan, <b>policy Brief</b> (kebijakan khusus) dan inovasi yang dirumuskan dan dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan Budaya dan kearifan local daerah

Sumber data : BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

#### 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 sebagaimana ditargetkan dalam RPMJD Tahun 2016-2021 dikategorikan tinggi. Hal ini disebabkan pada Tahun 2021 kebijakan pelonggaran kegiatan usaha dan sosial dengan tetap protocol Covid-19 ketat. Penyebaran COVID-19 sangat berdampak luas ke berbagai sektor di Kota Palu. Adapun sembilan sasaran strategis pemerintha Kota Palu diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1 yakni Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS.**

**Tabel 3.5**  
**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	95 %	100%	105

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu mempunyai peran dalam pengadaan penyediaan jaringan internet untuk 41 OPD dan 46 kelurahan di wilayah Pemerintah Kota Palu. Target capaian pada Tahun 2021 adalah 100 %, dalam pelaksanaannya, penyediaan jaringan internet di Pemerintahan Kota Palu telah direalisasikan sebesar 100%, yakni keseluruhan OPD dan Kelurahan telah mendapatkan akses jaringan internet. Pemerintah Kota Palu telah mendorong penggunaan sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS sebagai basis data pembangunan yang terintegrasi dari tingkat perangkat daerah, wilayah kecamatan sampai di tingkat kelurahan.

**Sasaran 2 yakni Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan**

**Tabel 3.6**  
**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka rata-rata lama sekolah	11,5	11,72	102%
2	Angka harapan lama sekolah	16,4	16,28	99%

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2021 terealisasi 11,72 tahun dari target 11,50 tahun, sehingga capaiannya sebesar 101,95%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 11,60 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,12%. Rata rata lama sekolah dari tahun 2020 cenderung meningkat, sehingga dapat disimpulkan tingkat Pendidikan penduduk Kota Palu semakin baik.

Indikator sasaran Harapan Lama sekolah menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 99% dari target yang di rencanakan. Harapan lama sekolah 16,28 tahun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 16,24 tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya telah dibukanya pembelajaran tatap muka terbatas dan penggabungan antara metode dalam jaringan dan metode luar jaringan dalam pembelajaran.

### Sasaran 3 yakni Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan

Tabel 3.7

#### Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka harapan hidup	70,69	71,09	101%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata angka harapan hidup penduduk Kota Palu adalah 71,09 tahun. Hal ini disebabkan peran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palu yang menerapkan berbagai program dan kegiatan kesehatan, baik berskala nasional maupun daerah guna menunjang angka harapan hidup. Hal ini dapat dilihat dari segi perbaikan gizi masyarakat dan sosialisasi PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) kepada masyarakat yang terlaksana dengan baik. Hal ini juga telah ditopang dengan telah ditetapkannya Kota Palu sebagai pelayanan kesehatan universal (*Universal Health Coverage*).

### Sasaran 4 yakni Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB

Tabel 3.8

#### Capaian Sasaran Strategis Revitalisasi sektor pertanian dan IKM



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	23,35%	14,29%	61,19%

Capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 61,19% angka ini mengalami kenaikan dibanding Tahun 2020 yaitu hanya sebesar 56,10%. Angka capaian Kontribusi Sektor Pertanian dan Perdagangan terhadap PDRB tahun 2021 mengalami kenaikan akibat adanya kebijakan pelonggaran pada fasilitas perdagangan Kota Palu. Pelonggaran aktivitas pelaku usaha berpengaruh pada aktivitas perdagangan perekonomian, sehingga berdampak cukup signifikan terhadap pendapatan (*Output*) pedagang atau pelaku usaha.

**Sasaran 5 yakni Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah BerBasis kelompok dan kluster**

Tabel 3.9

**Capaian Sasaran Strategis daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Berbasis kelompok dan kluster**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	12,44	6,49	52,17

Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2021 dengan indikator kinerja kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 6,57 %. Angka capaian kinerja sasaran sebesar 52,17 % dengan predikat capaian rendah. Hal ini disebabkan karena kendala akses bahan baku karena terganggunya *supply chain* dari daerah pemasok utamanya dari pulau Jawa. Selain itu adanya lonjakan harga bahan baku sehingga para IKM menahan diri untuk melakukan produksi massif dan cenderung hanya melayani pesaaanan saja.

**Sasaran 6 yakni Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Tabel 3.10

**Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	79,48% (Baik)	82,39% (Sangat Baik)	103,66

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi pelayanan publik yang diberikan oleh Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan dapat dilihat bahwa capaian indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** sudah **Sangat Baik**.

**Tabel 3.11**  
**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	3,02% (Baik)	2,86% (Sangat Baik)	94,75%

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, realisasi dengan **Skor 2,8613** dari target Skor 3,0150 mendapat **Prestasi Tinggi**. Penilaian ini berdasarkan hasil evaluasi Tim Daerah/Nasional EPPD untuk tahun anggaran 2020.

**Tabel 3.12**  
**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelaksanaan Keuangan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100

Hasil evaluasi indikator kinerja opini laporan keuangan pemerintah Kota Palu di tahun 2021 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Capaian sasaran ini diperoleh dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI.

**Tabel 3.13**  
**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	BB	B	75

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap indikator Nilai Evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan predikat B (Tahun 2019) dari target BB berbagai rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti :

1. Telah memastikan bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2021 memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pihak-pihak yang menandatangani, maupun dari segil kualitas pada setiap jenjangnya (*cascade down*).
2. Setiap organisasi perangkat daerah telah menyusun dan menetapkan rencana aksi yang berisi *output* yang ingin dihasilkan, maupun aktivitas yang ingin dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja tahunan.
3. Telah meningkatkan budaya manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Palu, sehingga perjanjian kinerja bukan lagi sekedar formalitas/sebuah dokumen, namun sebagai bentuk komitmen kinerja yang ingin dicapai dan secara berkala dilakukan pemantauan serta evaluasi atas pencapaian target kinerja yang diperjanjikan.
4. Telah mengembangkan aplikasi teknologi informasi e-kinerja sehingga dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja serta sebagai media dalam melakukan reuiu capaian kinerja secara berkala.
5. Telah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP melalui metode *coaching clinic* dan *in house training*.

### Sasaran 7 yakni Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur

Sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan infrastruktur diukur dengan pencapaian 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

1. Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat
2. Rasio sampah tertangani
3. Cakupan layanan transportasi kota
4. Indeks kualitas lingkungan hidup
5. Rasio jalan kondisi mantap

Adapun pencapaian indikator kinerja tersebut dapat lihat pada masing-masing tabel berikut ini:

**Tabel 3.14**

#### **Capaian Sasaran Strategis kawasan terintervensi Berbasis Budaya dan adat**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
----	-------------------	--------	-----------	-----------

1	Cakupan Kawasan terintervensi Berbasis Budaya dan adat	95%	95%	100%
---	--	-----	-----	------

Indikator Kinerja cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat jumlah *Sculpture* berbasis Nilai budaya dan Sejarah, dari 5 Buah *sculpture* yang ditargetkan, dengan realisasi yaitu 3 (tiga) Buah *sculpture* Berupa: 1 (satu) Monumen Nosarara Nosabatutu dan 2 (dua) Buah Gerbang Kota dengan ornamen tradisional “*taiganja*” sebagai *icon* yang merepresentasikan kebudayaan Suku Kaili penduduk asli Kota Palu. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur angka capaian kinerja sarasannya sebesar 100 % dengan predikat **berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan infrastruktur, pada Indikator kinerja cakupan kawasan terintervensi berbasis Budaya dan adat disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2021 telah membangun dekorasi kota dalam bentuk ornamen yang bercirikan budaya yaitu Taman GOR. Ornament tersebut mencerminkan nilai toleransi, nilai kekeluargaan dan nilai gotong royong.

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dengan Sasaran Strategis meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dengan indikator kinerja cakupan kawasan terintervensi Berbasis Budaya dan adat dengan capaian **Berhasil** di karenakan terdapat 1 Pusat Wisata berbasis religi dan 7 pusat wisata berbasis Budaya. Dengan rincian wisata sebagai Berikut :

1. Pusat Wisata Religi berlokasi di Jl. Sis Aljufri
2. Pusat Wisata Budaya adalah sebagai Berikut :
  - a. Wisata Budaya/Sejarah :
    - Makam Pue Njidi;
    - Makam Pue Nggari;
    - Makam Pue Mantikulore;
    - Makam Raja Galara.
  - b. Wisata Alam :
    - Wisata Budaya Kampung Kaili (sebelum terjadi bencana);
    - Wisata Budaya Bukit Salena;
    - Wisata Budaya Uwentumbu;

**Tabel 3.15**  
**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Rasio Sampah Tertangani**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	Rasio sampah tertangani	100%	92,50%	92,50%

Tabel 3.15 menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja rasio sampah tertangani mencapai 92,50%, dengan perhitungan meliputi 3 (tiga) indikator yaitu:

- a. Jumlah Potensi Timbulan Sampah Kota Palu,
- b. Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah,
- c. Jumlah Penanganan Sampah

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, pencapaian rasio sampah tertangani di Kota Palu dapat dikatakan sudah baik. Pencapaian ini tentu saja didukung dengan alat-alat pendukung pengangkutan sampah yang sudah memadai seperti motor roda 3, mobil pengangkut sampah dan ekskavator. Proses penanganan sampah di Kota Palu dimulai dari pengumpulan sampah-sampah dari rumah-rumah menggunakan kendaraan roda 3 untuk dikumpulkan pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang kemudian akan diangkat menggunakan mobil pengangkut sampah (truk sampah) menuju Tempat pembuangan Akhir (TPA).

Pada pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ketiga ketiga yaitu cakupan layanan transportasi kota terlihat sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.16**  
**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Transportasi**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Cakupan Layanan Transportasi Kota	100%	53 %	53%

Hasil evaluasi dari indikator kinerja ketiga yaitu cakupan layanan transportasi kota dengan capaian tahun 2021 hanya sebesar 53%. Hal ini disebabkan karena ketersediaan terminal kota, penambahan jumlah lintasan trayek, tersedianya halte, penataan titik parkir dan penertiban angkutan kota.

Pada pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ketiga keempat yaitu *indeks kualitas lingkungan hidup* terlihat sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.17**  
**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4	Indeks kualitas lingkungan hidup	73,92%	67,2%	90,91%

Tabel 3.17 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 diperoleh kinerja sasarnya sebesar 90.9% dari target yang telah ditetapkan. Perhitungan indikator kinerja sasaran strategis indeks kualitas lingkungan hidup menggunakan variabel pengukuran: defisit perumahan, akses pasokan air,

sanitasi yang baik, akses penyediaan layanan listrik, akses pendidikan, akses layanan kesehatan dan tingkat pendapatan pribadi atau rumah tangga.

Selanjutnya, untuk pencapaian indikator kinerja sasaran strategis rasio jalan kondisi mantap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.18**  
**Capaian Sasaran Strategis Rasio Jalan Kondisi Matap**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
5	Rasio jalan kondisi mantap	90,14%	63,69%	70,66%

Tabel 3.18 memperlihatkan bahwa capaian indikator jalan dalam kondisi mantap sebesar 63,69% dari target 90,14%, mengalami penurunan sebesar 26,45%, hal ini disebabkan karena beberapa ruas jalan yang rusak akibat bencana alam belum dapat tertangani secara tuntas.

Indikator jalan dalam kondisi mantap diukur dengan pendekatan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap panjang jalan di Kota Palu. Dimana panjang jalan Kota Palu dalam kondisi baik dan sedang sampai dengan tahun 2019 adalah 514,88 km dan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2021 adalah 47,132 km dan total panjang jalan yang menjadi kewenangan Kota Palu adalah 851,558 km.

### **Sasaran 8 yakni Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak Bencana**

Sasaran strategis *meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak Bencana* diukur melalui indikator kinerja yaitu indeks resiko bencana yang menggambarkan tingkat risiko bencana di Kota Palu. Hasil evaluasi terhadap indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.19**  
**Capaian Sasaran Strategis Indeks Resiko Bencana**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Resiko Bencana	110,54%	162,70%	52,81%

Berdasarkan buku *Indek Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021* yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menunjukkan bahwa Kota Palu masuk dalam daerah dengan kelas risiko bencana tinggi dengan skor 162,70. Olehnya, dibutuhkan peningkatkan ketangguhan kota (*resilience cities*). Masih tingginya risiko bencana Kota Palu menjadi tantangan yang harus diikuti dengan kesiap-siagaan bagi seluruh warga Kota Palu.



**Sasaran 9 yakni Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan Budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat**

**Tabel 3.20**  
**Capaian Sasaran Strategis Indeks Kerukunan Beragama**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kerukunan Beragama	75	76,6	102,13%

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja indeks kerukunan beragama, pada Tahun 2021 realisasi pencapaian dengan Nilai 76,6 dari target nilai 75 dengan capaian 102,13% atau kategori sangat tinggi. Pencapaian kinerja indeks kerukunan beragama dari hasil pengukuran beberapa indikator yaitu (a) toleransi yang didalamnya ada saling pengertian, saling menerima, saling menghormati dan menghargai perbedaan sesama pemeluk agama; (b) kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas; (c) kerjasama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan; dan (d) potensi lokal, meliputi dukungan sumber daya lokal seperti ormas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh etnik, dan hukum adat dalam mendukung tercapainya kerukunan antar umat beragama. Hasil ini memberikan gambaran, bahwa masyarakat Kota Palu dapat menjaga kerukunan beragama tanpa membeda-bedakan ragam agama yang dianut.

Untuk evaluasi terhadap indikator kinerja jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya, realisasi sejumlah 16 kebijakan yang telah dibuat pada Tahun 2021 dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan dari target 26 Kebijakan, pencapaian terhadap indikator kinerja jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya berdasarkan pembuatan peraturan sebanyak 35 Perwali yang berhubungan dengan seni budaya dan adat istiadat yang bertujuan untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya penduduk lokal yang mulai terkikis oleh zaman, tanpa meninggalkan norma dan kaidah agama.

**Tabel 3.21**  
**Capaian Sasaran Strategis Kebijakan Pemda**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	Jumlah kebijakan pemda yang Berorientasi kearifan lokal dan Budaya	28	35	125%

Indikator kinerja jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya, realisasi capaian kinerja sebanyak **35** yang telah dibuat dan ditetapkan dalam bentuk keputusan dan peraturan dari jumlah target 28 Kebijakan dengan realisasi 35 kebijakan, capaian kinerja 125% atau kategori sangat tinggi.

## 5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja Tahun 2021 dengan realisasi anggaran Tahun 2021 dengan rincian realisasi capaian target kinerja Tahun 2021 pada tabel berikut:

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Target dan realisasi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2021	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021	% Capaian target	Target Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran 2021 (Rp)	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	95 %	100%	105	7.105.752.036	4.536.104.187	63,84
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,50	11,72	102%	62.468.766.352	45.376.234.338	72,64
		Angka harapan lama sekolah	16,40	16,28	99%			
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70,69	71,09	101%	279.355.235.649	115.899.826.531	41,49
4	Meningkatnya revitalisasi sector pertanian dan IKM	Kontribusi sector pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	23,35%	14,29%	61%	11.489.427.201	10.648.273.922	92,68
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	12,44%	6,49%	101,91%	1.238.054.039	1.129.642.585	91,24

6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	79,48 (Baik)	82,39 % (Sangat Baik)	103,66%	10.565.681.508	10.156.020.949	96,12
		Nilai Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3,02	2,8613	94,75			
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100			
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	BB	B	75			
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan Kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	95%	95%	100%	211.195.500	198.989.000	94,22
		Rasio sampah tertangani	100%	92,50%	92,50%	34.682.260.010	32.422.021.914	93,48
		Cakupan Layanan Transportasi Kota	100%	53 %	53%	6.882.183.834	6.153.278.941	89,41
		Indeks kualitas lingkungan hidup	73,92	67,2%	90,91%	44.228.150	44.208.150	99,95
		Rasio jalan kondisi mantap	90,14 %	63,69 %	70,66 %	140.158.950.876	110.706.126.859	78,99

<b>8</b>	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak Bencana Budaya	Indeks resiko Bencana	110.54	162,70	52,81%	<b>293.364.026.291</b>	<b>255.891.957.684</b>	<b>87,23</b>
<b>9</b>	Meningkatnya penerapan nilai nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan Beragama	75	76,6	102,13%	<b>6.698.625.539</b>	<b>6.519.643.020</b>	<b>97,33</b>
		Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan Budaya	28	35	125%	<b>1.564.711.910</b>	<b>1.243.771.000</b>	<b>79,49</b>

Sumber : Bapedda Kota Palu Tahun 2022, diolah

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dengan membandingkan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Tabel diatas menunjukkan kinerja fisik sasaran daerah secara keseluruhan sudah tercapai 87,82 % dan untuk realisasi anggaran mencapai 84,49%, artinya anggaran yang ada sudah digunakan secara optimal untuk mencapai target sasaran. Efisiensi anggaran disebabkan adanya Pandemi Covid-19 dimana kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung tidak dapat dilaksanakan karena harus memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, efisiensi juga disebabkan oleh sisa anggaran lelang, penyesuaian kebutuhan anggaran aparatur yang bersifat operasional, perjalanan dinas, serta alat tulis kantor. Secara rinci efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.23**  
**Efisien Anggaran Pencapaian Target Sasaran Strategis Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2021	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021	% Capaian target	Target Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran 2021 (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
1	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	95 %	100%	105	7.105.752.036	4.361.935.869	36,16
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,50	11,72	102%	62.468.766.352	45.376.234.338	27,36
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70,69	71,09	101%	279.355.235.649	115.899.826.531	58,51
4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	79,48 (Baik)	82,39 % (Sangat Baik)	103,66%	10.565.681.508	10.156.020.949	3,88
5	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan Kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	95%	95%	100%	211.195.500	198.989.000	5,78
6	Meningkatnya penerapan nilai nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan Beragama	75	76,6	102,13%	6.698.625.539	6.519.643.020	2,67
		Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan Budaya	28	35	125%	1.564.711.901	1.243.771.000	20,51

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, diolah.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Berpedoman pada indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016–2021 diarahkan kepada :

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sisi belanja dengan pendekatan rasionalitas, realitas dan proporsional;
4. Meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; dan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.304.695.508.265,00 dengan rincian sebagai Berikut:

#### 1. Pendapatan

Berdasarkan RPJMD Kota Palu Tahun 2016 – 2021 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada tiga pendekatan yaitu rasional, realistis dan proporsional serta mendapat dukungan dari masyarakat. Pada Tahun 2021 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.304.695.508.265,00. Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran sebagai Berikut:

**Tabel 3.24**

#### **Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2021**

<b>URAIAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>PAD</b>	276.431.341.318,00	341.303.521.613,75	123,47



<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>952.543.444.465,00</b>	<b>987.164.953.521,00</b>	<b>103,63</b>
<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>75.720.722.082,00</b>	<b>63.035.341.000,00</b>	<b>83,25</b>
<b>Total</b>	<b>1.304.695.508.265,00</b>	<b>1.391.503.816.134,75</b>	<b>106,5</b>

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2021

Tabel 3.24 menguraikan capaian PAD melebihi target dari yang ditetapkan sebesar Rp.276.431.341.318,00 yang terealisasi sebesar Rp.341.303.521.613,75 atau sebesar 123,47%. Realisasi pendapatan transfer Tahun 2021 sebesar Rp.987.164.953.521,00 atau mencapai 103,63% dari target yang direncanakan. Untuk realisasi lain-lain pendapatan yang sah hanya terealisasi sebesar Rp.63.035.341.000,00 atau terealisasi 83,25 %.

## 2. Belanja Daerah

Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan pendekatan program dan kegiatan berbasis *outcome*. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi misi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Kebijakan Belanja daerah secara deskriptif dapat dituangkan ke dalam Tabel 3.23 :

**Tabel 3.25**

### **Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2021**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>TAHUN ANGGARAN 2021 SETELAH PERUBAHAN</b>		
		<b>Anggaran Belanja (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Belanja operasi	1.564.415.276.362,00	1.346.744.078.103,00	86,09%
<b>2</b>	Belanja Modal	331.643.328.851,00	259.476.501.891,00	78,24%

3	Belanja Tak Terduga	11.000.000.000,00	4.997.990.065,00	45,44%
Total Belanja		1.907.058.605.213,00	1.611.218.570.059,00	84,49%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.26 di atas, diuraikan bahwa belanja Tahun 2021 sebesar Rp.1.907.058.605.213,00,- yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp.1.564.415.276.362,00, belanja modal sebesar Rp.331.643.328.851,00, dan belanja tak terduga sebesar Rp. 11.000.000.000,00. Sementara untuk realisasi belanja sebesar Rp. 1.611.218.570.059,00 atau 84,49% yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 1.346.744.078.103,00, belanja modal sebesar Rp. 259.476.501.891,00, dan belanja tak terduga sebesar Rp. 4.997.990.065,00.

### 3. Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2021 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.24 berikut ini :

**Tabel 3.26**  
**Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN 2021 SETELAH PERUBAHAN		
		Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan daerah	602.363.096.948,00	602.363.096.947,52	100%
2	Pengeluaran daerah	0	0	100%
	Pembiayaan Netto	602.363.096.948,00	602.363.096.947,52	100%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.24 di atas penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 602.363.096.948,00 terealisasi sebesar Rp. 602.363.096.947,52 atau 100% dan pengeluaran pembiayaan daerah yang ditargetkan besar Rp. 0,00,- terealisasi sebesar Rp. 0,00,- atau 100%.

### 3.3 Inovasi Pemerintah Kota Palu

Indeks inovasi daerah terdiri dari 2 Aspek yaitu aspek satuan pemerintah daerah dan aspek satuan inovasi. Aspek Satuan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 variabel yaitu variabel institusi dan sumber daya manusia dan penelitian. Sedangkan Aspek Satuan Inovasi terdiri atas 5 Variabel yaitu Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Proses Bisnis, Output Pengetahuan dan Teknologi, serta Hasil Kreatif.

Hasil pengukuran oleh Badan Litbang Kemendagri Tahun 2021, menunjukkan performa indeks inovasi Kota Palu meliputi institusi 31,01, SDM dan Penelitian sebesar 85,71, infrastruktur sebesar 93,75, kecanggihan produk sebesar 60, kecepatan bisnis proses sebesar 79,17, output pengetahuan dan teknologi sebesar 84,17, dan hasil kreatif sebesar 82,31.

Hingga Tahun 2021, Kota Palu telah melaporkan 10 inovasi dalam sistem *Inovation Government Award* (IGA). Inovasi-inovasi tersebut berasal dari inisiasi OPD, ASN, masyarakat, dan kepala daerah. Inovasi tersebut, meliputi :

#### 1. SIMALEO BERGERAK (SISTEM MOBILE DOKUMEN



SIMALEO BERGERAK merupakan akronim dari *systemmobile* dokumen kependudukan bersih, gratis, dan praktis. Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat baik anak-anak sampai dengan para orang tua tanpa harus membedakan gender. Sulitnya mengakses loket pelayanan kependudukan yang hanya berada di pusat kota menjadi kendala bagi kaum Wanita dan kelompok rentan lainnya khususnya yang berada di wilayah pegunungan.

## 2. PELAYAN SEKSI



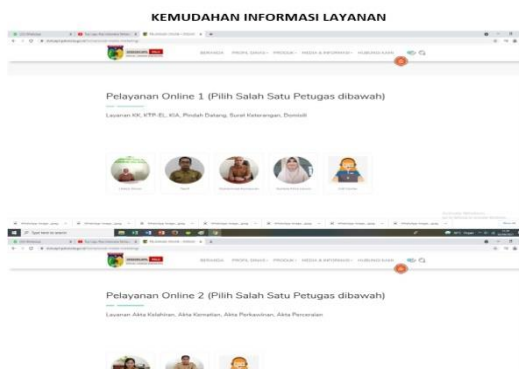
PELAYAN SEKSI Merupakan pelayanan khusus petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi para kelompok rentan yaitu disabilitas, orang sakit dan lansia yang memiliki keterbatasan dan kesulitan untuk mendapat akses atas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, inovasi ini memberikan kemudahan bagi kelompok seksi berupa loket khusus di kantor tanpa antrian dan berkas persyaratann serta menempatkan petugas khusus mobile di lapangan bagi kelompok seksi yang tidak dapat datang langsung ke kantor.

### 3. PELANGI KECAMATAN



PELANGI KECAMATAN merupakan Inovasi Pelayanan MORAMBANG KITA MARISI, ini dilakukan agar masyarakat diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban serta pemenuhan hak didalam kepemilikan dokumen kependudukan.

### 4. LOKET CERIA



Inovasi LOKET CERIA (Loket khusus yang cepat, ramah, inovatif dan amanah), dimana masyarakat menerima layanan *All in One* dengan satu kali pengurusan menghasilkan beberapa dokumen kependudukan.

## 5. ALPUKAT



ALPUKAT merupakan inovasi pelayanan yang bertujuan sebagai percepatan peningkatan akta lahir bagi anak. Inovasi ini, mempermudah masyarakat yang melaksanakan pelayanan di RS bersalin maupun puskesmas-puskesmas.

## 6. KALEDO GRATIS

Inovasi Kaledo merupakan pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, mengembangkan ide terkait percepatan pelayanan bagi anak usia sekolah layanan yang bersifat mobile langsung ke sekolah sekolah baik Paud/TK SD SLTP/SMP, SMU/SLTA yang melayani anak sekolah khusus penerbitan Akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak bagi anak dibawa 17 tahun.





## 7. Tambahan Jam Pelajaran



Tambahan Jam Pelajaran merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu yang diberlakukan bagi peserta didik kelas V sekolah dasar negeri dan swasta untuk menanamkan nilai-nilai agama bagi peserta didik khusus kelas V sekolah dasar negeri dan swasta.

## 8. LASANDI



LASANDI merupakan Inovasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental orang dengan gangguan jiwa yang terlantar.

## 9. Rumah Singgah Nompelei Ntodea



Rumah Singgah Nompelei Ntodea merupakan rumah yang diperuntukkan bagi layanan terhadap gepeng, anak jalanan, anak terlantar, lansia terlantar, dan penyandang disabilitas. Program ini menindaklanjuti keluhan masyarakat mayangkut maraknya gelandang dan pengemis (Gepeng), di Kota Palu.

## 10. SATGAS K5



SATGAS K5 Program Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan yang merupakan Program Kerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu. Program ini bertujuan untuk ditumbuhkan kembali yaitu nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

## 11. LEMBAGA ADAT KAILI



LEMBAGA ADAT KAILI merupakan program pembentukan Lembaga Adat Kaili dan mengacu pada Misi ke enam Pemkot Palu yaitu, Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Bangsa. Dibentuknya lembaga ini, untuk menumbuhkan karakter asli To Kaili yang begitu menjunjung tinggi nilai2 budaya agar tidak pudarnya nilai kebudayaan.

## BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (***performance results***) Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 menggambarkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Palu selama Tahun 2021 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2016-2021. Sasaran strategis sebanyak 9 (sembilan) sasaran sebagaimana yang telah ditargetkan. Target yang digunakan sebagai dasar pengukuran mencakup 18 indikator kinerja sasaran. Capaian dari sembilan target sasaran yang meliputi 18 indikator kinerja sasaran sebesar 87,82 %. Capaian ini termasuk dalam kategori realisasi kinerja tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Palu juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja dalam Perubahan APBD Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.907.058.605.213,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.611.218.570.059,10 atau 84,49%. Tidak terserapnya anggaran ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19 dimana kegiatan yang melibatkan masyarakat harus memperhatikan protocol kesehatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Implementasi perencanaan anggaran yang berbasis keluaran menjadi kunci utama dalam pencapaian target kinerja serta mendukung efektivitas dan efisiensi anggaran. Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Palu di masa yang akan datang.



# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH PALU  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Hidayat, M.Si**

Jabatan : **Wali Kota Palu**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 04 Januari 2021





**1. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	95%
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama	11,50
		Angka harapan lama	16,40
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70,67
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	23,35%
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	12,44%
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	79,48 (baik)
		Nilai laporan penyelenggaraan	3,02
		Opini Laporan Keuangan	WTP
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	BB
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis Budaya dan adat	95%
		Rasio sampah tertangani	100%
		Cakupan Layanan Transportasi Kota	100%
		Indeks kualitas lingkungan hidup	>73,92
		Rasio jalan kondisi mantap	90,14%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks resiko Bencana	110,54
9		Indeks kerukunan beragama	75

	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal,	Jumlah kebijakan pemda yang Berorientasi kearifan lokal dan Budaya	28
--	---	--	----

Palu, 04 Januari 2021



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.707.912.600
2	Wajib Belajar sembilan Tahun	14,293,577,814
3	Pengembangan Pendidikan Non Formal	427,406,430
4	Obat dan Perbekalan Kesehatan	9,829,805,264
5	Upaya Kesehatan Masyarakat	31,000,711,260
6	Pengawasan Obat & Makanan	130,720,150
7	Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	961,339,280
8	Perbaikan Gizi Masyarakat	807,774,660
9	Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	776,968,775
10	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	315,450,630
11	Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	10.111.737.997
12	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	297.706.250
13	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak	3.432.361.450
14	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	138.607.115.970
15	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	1.951.223.348

16	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	742.808.000
17	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1.735.592.000
18	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	606.875.639
19	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	607.000.000
20	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5.255.346.569
21	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.620.680.306
22	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.564.391.515
23	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah	1.525.041.175
24	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	641.882.422
25	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.937.717.672
26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	542.384.795

27	Perencanaan Tata Ruang	2.147.216.500
28	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	14.257.966.745
29	Pembangunan Jalan dan JemBatan	70.250.668.096
30	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan JemBatan	25.595.395.440
31	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	11.880.988.000
32	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	8.155.791.950
33	Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	250.600.000
34	Lingkungan Sehat Perumahan	8.750.662.800
35	Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	245.308.800



## **PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. HADIANTO RASYID, S.E**

Jabatan : **Wali Kota Palu**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 2021

**WALI KOTA PALU**



**H. HADIANTO RASYID, S.E**



## Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi	2,54
		2. Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	26,41
		3. Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	63,47
2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	4. Indeks kota layak huni	30
		5. Indeks resiko bencana	150,16
		6. Indeks kualitas Lingkungan hidup	73,92
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	7. Indeks ketentraman dan ketertiban	100
4	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan	8. Persentase jalan yang berkeselamatan	1,34
		9. Persentase layanan angkutan darat	17,99
		10. Persentase luas Kawasan kumuh	0,67
		12. persentase rumah tidak layak huni.	11,40
5	Meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana	13. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	75
6	Meningkatnya ketangguhan kota	14. Indeks ketangguhan kota	263
7	Meningkatnya kualitas Pendidikan	15. Indeks pembangunan manusia	81,47
		16. Harapan Lama Sekolah	16,23
		17. Rata Rata Lama Sekolah	11,61
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	18. Angka Harapan Hidup Case Fatality Rate Covid-19	71,04
9	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan social	19. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang diberdayakan.	50
		20. Indeks Pembangunan Gender	97,96
		21. Indeks Kota Layak Anak	Pratama
10	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	22. Indeks Kerukunan Umat Beragama	82
		23. Indeks Aktualisasi Pancasila	60
		24. Indeks Pembangunan Kebudayaan.	48,11
11	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Pemerintahan	25. Indeks Reformasi Birokrasi	50,07
		26. Opini BPK	WTP

		27. Nilai Evaluasi AKIP	B
		28. Tingkat maturitas SPIP	LEVEL II
12	Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara	29. Indek profesionalitas ASN	50
13	Meningkatnya kinerja pelayanan Publik	30. Indeks Pelayanan Publik	B
14	Meningkatnya pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi	31. Indek Inovasi Daerah	23
		32. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik SPBE	1,54
15	Meningkatnya penataan regulasi daerah	33. Indeks kualitas kebijakan	60

Palu,

2021

WALI KOTA PALU,



H. HADIANTO RASYID

No	Program	Anggaran Perubahan Tahun 2021
1	Program Pengelolaan Pendidikan	48.133.793.614
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	124.841.497.076
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	21.213.600
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	664.565.250
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.741.880.500
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	23.192.075.023
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air SDA	3.684.504.545
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.826.199.276
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	221.931.870
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	10.894.497.665
11	Program Penataan Bangunan Gedung	44.214.911.753
10	Program Penyelenggaraan Jalan	140.158.950.876
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	277.402.025
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.734.495.299
13	Program Penataan Bangunan Gedung	472.367.300

14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	93.974.850
15	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.376.486.300
16	Program Pengembangan Perumahan	641.266.300
17	Program Kawasan Permukiman	24.108.698.310
18	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	44.533.134.908
19	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.416.647.746
20	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.524.468.715
21	Program Penanggulangan Bencana	392.020.367.550
22	Program Pemberdayaan Sosial	455.407.100
23	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	10.273.000
24	Program Rehabilitasi Sosial	690.661.450
25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.687.432.825
26	Program Penanganan Bencana	2.162.549.510
27	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	189.791.900
28	Program Penempatan Tenaga Kerja	15.712.800
29	Program hubungan Industrial	278.461.300
30	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.062.040.073

31	Program Perlindungan Perempuan	327.717.901
32	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	98.228.700
33	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.591.800
34	Program Pemenuhan Hak Anak PHA	79.765.600
35	Program Perlindungan Khusus Anak	263.222.075
36	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	686.771.225
37	Program Penanganan Kerawanan Pangan	626.604.792
38	Program Pengawasan Keamanan Pangan	52.936.400
39	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	23.716.000
40	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	163.005.425
41	Program Penatagunaan Tanah	259.400.020
42	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	44.228.150
43	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	353.434.510
44	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kehati	6.830.573.597
45	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH	931.338.249

46	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	264.154.480
47	Program Pengelolaan Persampahan	34.682.260.010
48	Program Pendaftaran Penduduk	1.619.507.180
49	Program Pencatatan Sipil	207.400.750
50	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	83.967.425
51	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	18.660.000
52	Program Pengendalian Penduduk	850.646.700
53	Program Pembinaan Keluarga Berencana KB	1.403.024.206
54	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera KS	562.545.900
55	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ	3.164.460.814
56	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6.203.903.500
57	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	90.204.075
58	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	81.006.250
59	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro UMKM	283.003.625
60	Program Pengembangan UMKM	188.569.725
61	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	53.610.375
62	Program Promosi Penanaman Modal	36.141.000
63	Program Pelayanan Penanaman Modal	175.310.525
64	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	330.350.500

65	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	71.992.000
66	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	866.476.640
67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.669.348.490
68	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	82.480.250
69	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	221.390.200
70	Program Pengembangan Kebudayaan	92.239.000
71	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	118.956.500
72	Program Pembinaan Perpustakaan	54.207.325
73	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	7.450.000
74	Program Pengelolaan Arsip	73.640.450
75	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	26.570.900
76	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	324.722.000
77	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.127.506.800
78	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	387.365.000
79	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	455.528.610
80	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	229.008.275
81	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.185.072.780



82	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	730.451.571
83	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	399.837.760
84	Program Perizinan Usaha Pertanian	47.080.775
85	Program Penyuluhan Pertanian	624.336.700
86	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	12.600.000
87	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.957.344.650
88	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	199.700.000
89	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	202.625.620
90	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	660.255.932
91	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	174.114.680
92	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	403.683.427
93	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.448.695.622
94	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.218.988.940
95	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	34.680.082.597
96	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.805.247.300
97	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.163.003.200

98	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.655.842.750
99	Program Kepegawaian Daerah	2.024.560.975
100	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.392.731.750
101	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	565.992.500
102	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.890.130.625
103	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	159.990.200
104	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.534.976.175
105	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	64.098.000
106	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.986.831.150
107	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.076.939.265
108	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	17.071.850
109	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.476.337.000
110	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	74.539.500

WALI KOTA PALU,

H. HADIANTO RASYID



PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR 050/394/Bappeda/2021

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA  
PALU TAHUN 2021

WALI KOTA PALU,

- Menimbang
- a. bahwa bahwa dalam rangka pemerintah yang terpadu dan terarah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara;

4. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peijanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kota Palu sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

KETIGA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

:

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 04 Januari 2021




LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI  
KOTA PALU NOMOR  
050/394/Bappeda/ 2021  
TENTANG INDIKATOR  
KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA PALU  
2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN  
2021

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	1	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	2	Angka rata-rata lama sekolah
		3	Angka harapan lama sekolah
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	4	Angka harapan hidup
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	5	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	6	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	7	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat
		8	Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
		9	Opini Laporan Keuangan
		10	Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	11	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat



		12	Rasio sampah tertangani
		13	Cakupan layanan Transportasi Kota Kota
		14	Indeks kualitas lingkungan hidup
		15	Rasio jalan kondisi mantap
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana	16	Indeks resiko bencana
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	17	Indeks kerukunan beragama
		18	Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya


  
**WALI KOTA PALU**
  

  
**Drs. Hidayat M.Si**



**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR : 800/116/ORGANISASI /2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALU**  
**TAHUN 2021-2026**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Palu dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021- 2026.

Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);
  11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tumbuhan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
  12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
  13. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palu.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WALI KOTA PALU,**



**HADIANTO RASYID**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR : 800/116/ORGANISASI /2022  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALU  
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	1	- Laju pertumbuhan ekonomi - Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB - Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB
2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	2	- Indeks kota layak huni - Indeks resiko bencana - Indeks kualitas Lingkungan hidup
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	3	Indeks keamanan dan ketertiban
4	Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan	4	- Persentase jalan yang berkeselamatan - Persentase layanan angkutan darat - Persentase luas Kawasan kumuh - Persentase rumah tidak layak huni.
5	Meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana	5	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW
6	Meningkatnya ketangguhan kota	6	Indeks Ketangguhan Kota
7	Meningkatnya kualitas pendidikan	7	- Indeks Pembangunan Manusia - Harapan Lama Sekolah - Rata Rata Lama Sekolah
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Angka harapan hidup Case fatality rate covid-19
9	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	9	- Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang diberdayakan. - Indeks Kerukunan Gender - Indeks Kota Layak Anak
10	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	10	- Indeks kerukunan umat beragama - Indeks Aktualisasi Pancasila - Indeks pembangunan kebudayaan.
11	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Pemerintahan	11	- Indeks Reformasi Birokrasi - Opini BPK - Nilai Evaluasi AKIP - Tingkat Maturitas SPIP

12	Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara	12	Indek Professionalitas ASN
13	Meningkatnya kinerja pelayanan Publik	13	Indeks Pelayanan Publik
14	Meningkatnya pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi	14	- IndeksInovasi Daerah - Nilai Indeks Sistem - Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
15	Meningkatnya penataan regulasi daerah	15	Indeks Kualitas Kebijakan

**WALI KOTA PALU,**



**HADIANTO RASYID**

**Piagam Penghargaan**  
**Pemerintah Kota Palu Tahun 2021**





**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Letjen Soeprato No. 36 A Telp./Fax. (0451) 4018000 Palu

---

**LAPORAN HASIL REVIU**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2021**



**NOMOR : 706/03-LHR/ITKOT/2022**  
**TANGGAL: 31 Maret 2022**



## PEMERINTAH KOTA PALU INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letjen Soeprato No. 36 A Telp./Fax. (0451) 4018000 Palu

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Palu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, dan berkualitas. Reviu mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan lingkup evaluasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait tujuan memberi penilaian atas kinerja yang dilaksanakan.

Berdasarkan reviu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, 31 Maret 2022

INSPEKTUR,

**MULIATI, S.H. M.M.M.H**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650805 199203 2 014



## PEMERINTAH KOTA PALU INSPEKTORAT DAERAH

JL. Letjen Soeprato No. 36 A Telp./Fax. (0451) 4018000 Palu

---

Palu, 31 Maret 2022

Nomor : 706/03 -LHR/RHS/IB-I/ITKOT  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021

Dengan ini kami sampaikan laporan Hasil Reviu Atas Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 dengan tolak ukur Dokumen Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen lain yang mendukung dengan hasil sebagai berikut :

### A. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu untuk tahun Anggaran 2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Palu. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid lingkup evaluasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait tujuan memberi penilaian atas kinerja yang dilaksanakan.

Berdasarkan reuiu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

## B. Dasar Reuiu

Pelaksanaan Reuiu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Intansi Pemerintah.
2. Surat Perintah Walikota Palu Nomor: 700/1161 /Itkot/2022 tanggal 16 Maret 2022

## C. Tata Cara Reuiu

1. Pihak yang melaksanakan reuiu :

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Muliati, S.H,M.M,M.H	Penanggung Jawab
2	Evi Oktavia, ST,MM	Wakil Penanggungjawab
3	Susik, SKM,M.Si	Pengendali Teknis
4	Evagelyn Ocsin K, SH	Ketua Tim
5	Arni, S.H	Anggota Tim
6	Farida Pakamundi, S.Sos	Anggota Tim
7	Nizarwati, ST,MM	Anggota Tim
8	Rosedj, S.P,MM	Anggota Tim



#### **D. Tujuan Reviu**

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

#### **E. Ruang lingkup pelaksanaan Reviu**

Penelaahan Format, Mekanisme Penyusunan dan Substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021

#### **F. Simpulan dan Rekomendasi**

##### **1. Simpulan**

Reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta terdapat beberapa rekomendasi kami mengarah perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Laporan kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 disusun oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Palu No.060/1069/Organisasi/2021 Tanggal 16 Oktober 2021 dengan Leading Sektor. Proses penyusunan laporan tersebut telah melalui proses mekanisme penyusunan yang memadai, namun masih terdapat kelemahan - kelemahan dalam pengendalian, kelemahan tersebut sebagai berikut :

a. Mekanisme penyusunan

- Pada Bab 2 Belum sesuai dengan Permenpan 53 tahun 2014
- Belum ada mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja tim penyusun LKj IP
- Belum ditetapkan Penanggungjawab Pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja

b. Subtansi

- Beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja yaitu
  1. Kontribusi kategori industry pengolahan terhadap PDRB dari target 23,35 hanya mencapai 14,29 penyebabnya karena Pandemi Covid-19
  2. Kontribusi sector pertanian dan perdagangan terhadap PDRB dari target 12,44 mecapai 6,49 penyebabnya karena Pandemi Covid-19

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, direkomendasikan kepada Walikota Palu kiranya dapat memerintahkan kepada Sekretaris daerah Kota Palu Agar:

a. Dalam Hal Mekanisme Penyusunan :

- Pada Bab 2 harus sesuai dengan Permenpan 53 tahun 2014
- Mekanisme dan penyampaian data/informasi dari unit kerja sebagai batas waktu penyampaian Lakip OPD kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemda ditetapkan menjadi Standar Oprasional Prosedur (SOP).
- Menetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja.

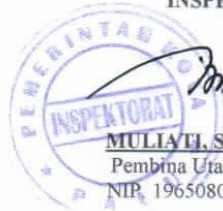
b. Dalam Hal Subtansi

- Melakukan perbaikan target kinerja agar pada tahun berikutnya dapat tercapai sesuai dengan perjanjian Kinerja dan berdampak ke Masyarakat sesuai Tujuan RPJMD.

G. Tindak Lanjut Hasil reuiu sebelumnya

Saran dari Tim reuiu tahun lalu belum semua ditindaklanjuti  
Demikian hasil reuiu ini kami sampaikan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.

INSPEKTUR,



MULIYATI, S.H., M.M., M.H  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650805 199203 2 014